

# Ambisi APBN di Tahun Politik

Kamis , 01 November 2018 | 08:12

[http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/4462/ambisi\\_apbn\\_di\\_tahun\\_politik](http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/4462/ambisi_apbn_di_tahun_politik)



Sumber Foto Istimewa Ilustrasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui APBN 2019 untuk disahkan dalam sidang paripurna yang berlangsung Rabu (31/10). Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan anggaran belanja Rp 2.461,1 triliun, sehingga terdapat defisit Rp 296 triliun atau setara 1,84% dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit anggaran tahun 2019 tersebut tersebut lebih rendah dibandingkan *outlook* tahun 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB atau Rp 314,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ditetapkan sebesar 5,3% dan inflasi sebesar 3,5%. Sementara, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diasumsikan Rp 15.000. Adapun, asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,3%. Harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) pada tahun 2019 sebesar US\$70/barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi masing-masing 775.000 barel/hari dan 1,25 juta barel setara minyak/hari

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN 2019 disusun dengan postur yang lebih sehat, adil dan mandiri. Maksudnya, sehat karena defisitnya menurun. Adil karena sasarannya lebih menjangkau upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan mandiri karena sebagian besar dibiayai penerimaan pajak dan lain-lain.

Kita mencatat mencatat dua masalah penting dalam APBN 2019 tersebut yang perlu dicermati dengan seksama karena pengaruhnya akan terasa bagi kalangan dunia usaha:

**Pertama**, perubahan nilai tukar rupiah terhadap US\$. Dalam APBN 2018 nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 14.400 dan tahun depan diturunkan menjadi Rp 15.000. Hal ini

dikritik oleh sebagian anggota DPR sebagai wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stabilitas mata uang rupiah. Hal tersebut terlihat dalam kenyataan saat ini ketika kurs rupiah terus merosot jauh di bawah asumsi yang ditetapkan pemerintah.

**Kedua**, ambisi penerimaan pajak. Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak dari Rp 1.424 triliun dalam APBN 2018 menjadi Rp 1.786 triliun tahun depan. Ini ambisi yang terlalu optimistik karena tahun ini saja Ditjen Pajak diperkirakan tidak bisa memenuhi target penerimaannya.

Khusus mengenai penerimaan pajak, hingga akhir September lalu baru tercapai Rp 900,82 triliun atau sekitar 63,26% dari target APBN 2018. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan pernah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya bisa sekitar 95% dari target. Kekurangannya, kata Pakpahan, masih bisa ditutupi dengan pos penerimaan negara yang lain. "Sampai akhir tahun outlooknya 95% yang dikelola Ditjen Pajak. Tapi kalau digabung dengan Bea Cukai, PNPB kan bisa 100% lebih, optimis. Pendapatan negara ya. Kalau DJP sendiri *shortfall* 5%," katanya beberapa waktu lalu.

Kita berharap optimisme pemerintah bisa terwujud. Pemerintah tetap pada ambisinya untuk menaikkan basis penerimaan pajak dengan *tax ratio* menjadi 16% tahun depan, meski kenyataannya tahun lalu baru sekitar 10,3%. Angka *tax ratio* tersebut justru terus menurun dalam lima taun terakhir. Pada tahun 2013 *tax ratio* kita sekitar 11,3% terus menurun tinggal 10,4% tahun 2016 dan tahun lalu 10,3%. Angka tersebut jauh di bawah *tax ratio* negara-negara tetangga.

Setelah memberlakukan program *tax amnesty* dengan harapan mampu menjaring wajib pajak (WP) baru, tahun ini pemerintah berusaha merayu pengusaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Caranya dengan menurunkan tarif final dari 1% menjadi hanya 0,5%.

Namun situasi perekonomian yang cukup sulit belakangan ini sangat memberatkan WP terlebih UMKM. Kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap US\$ juga menambah beban bagi dunia usaha, terutama mereka yang menggunakan bahan baku impor. Dampaknya kini mulai terasa. Beberapa laporan mengatakan bahwa kontraktor di sejumlah daerah mulai kesulitan akibat kenaikan harga berbagai macam material bangunan.

Bila kondisi ini terus berlanjut, diperkirakan banyak kontraktor merugi dan gulung tikar karena tidak mampu lagi menanggung beban. "Khususnya pengusaha konstruksi di daerah, pasti akan banyak tumbang kalau rupiah tidak membaik dan makin memburuk. Hal ini karena kemampuan finansial mereka rata-rata terbatas," kata Ketua Gabungan

Pengusaha Kontruksi Indonesia (GAPENSI) Kalsel Edy Suryadi, seperti dikutip *Bisnis.com*, beberapa waktu lalu.

Ini fakta yang buruk dan mencemaskan. Namun pemerintah tidak punya banyak pilihan kecuali harus bekerja keras dan cerdas dalam mengamankan APBN, apalagi di tahun politik 2019 nanti. Ini bisa merupakan pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan kursi kekuasaannya dalam Pilpres nanti.

Namun kita ingin mengingatkan bahwa pada akhirnya kepercayaan rakyat menjadi factor sangat utama. Terlebih dalam hal penarikan pajak, trust harus terus ditingkatkan. Kepercayaan tersebut tumbuh bila rakyat merasakan penegakan hukum yang adil, pengelolaan uang negara yang lebih akuntabel, serta prioritas pembangunan yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Sumber Berita:Berbagai sumber